RESISTENSI ELIT LOKAL DAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
(Studi Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan

Oleh:

R. INDRA TRI KUSUMA

NIM. 10192497/P

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2014

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
INTI SARI xiii
ABSTRACT xiv

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang 1
- B. Perumusan Masalah 7
- C. Batasan Masalah 7
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
- A.Tinjauan Pustaka 9
  - 1. Keaslian Penelitian 9
  - 2. Kajian Teoritis Tentang Resistensi Masyarakat 15
    - a. Pengertian Resistensi 15
    - b. Resistensi Dalam Perspektif Konflik 18
  - 3. Kajian Teoritis Penggunaan Tanah 19
    - a. Penggunaan Tanah 19
    - b. Perubahan Penggunaan Tanah 21
    - c. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah 22
    - d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan penggunaan tanah 30
    - c. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah 32
- B. Kerangka Pemikiran 36

BAB III. METODE PENELITIAN
- A. Jenis Penelitian 39
- B. Lokasi Penelitian 40
- C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 41
- D. Teknik Penjaringan Informan 42
- E. Teknik Pengumpulan Data 42
- F. Teknik Analisis Data 44

BAB IV. DESA SIDOMULYO DAN KECAMATAN GODEAN: SEBUAH GAMBARAN
A. GAMBARAN UMUM DESA SIDOMULYO 45
1. Letak, Batas, Dan Luas Desa Sidomulyo 45
2. Kondisi Fisik Desa Sidomulyo 47
3. Kondisi Demografi Dan Fasilitas Umum Desa Sidomulyo..... 49
4. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Desa Sidomulyo..... 56
5. Penggunaan Tanah Desa Sidomulyo 59
B. GAMBARAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI GODEAN
1. Perubahan Penggunaan Tanah di Kecamatan Godean 62
2. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Godean..... 64

BAB V. ELIT LOKAL DAN MASYARAKAT DESA SIDOMULYO
A. KEKHAWATIRAN ELIT LOKAL DESA SIDOMULYO ... 67
B. KEBIJAKAN ELIT LOKAL SIDOMULYO 69

C. RESISTENSI MASYARAKAT DAN PENTINGNYA SAWAH KEBERLANJUTAN 78
D. KEBIJAKSANAAN ELIT LOKAL DESA SIDOMULYO.. 88

BAB VI. PENUTUP
A. KESIMPULAN 98
B. SARAN 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

The population is increasing in line with the changing times. The increasing population is results in the increase of land necessities for housing. The increase of residence necessities is utilized by the developer to construct housing complex. The consequence is in form of the construction which will lead to productive agriculture lands. The area development beyond urban area in form of residence construction has changed land use condition. The area which initially closely related with the agriculture activity starts changing into non-agriculture activities. The change of land use will have an impact on food resilience and the community social condition, culture, or economic aspects. The impact of this land use change generates the local elite and Sidomulyo village residents concern, thus they resist against the change of land use

Therefore the researcher performed a research in Sidomulyo village by using qualitative method, with informants consisted of community leader, Sidomulyo village apparatuses, and community member. This research managed to obtain a primary data, namely interview result with the informants, and secondary data derived from Sidomulyo village, BPS office, Bappeda office as well as Land Office of Sleman District.

Results of this research were: (1) The local elite at Sidomulyo village established a policy to refuse the construction of housing complex with the aims were to manifest food resilience and protect its citizens from economic social as impact of the change of land use. (2) The Sidomulyo village community who mostly work as farmer perceived worry on the impact of the change of land use, thus the community acted resistant. The resistant attitude addressed by the Sidomulyo community was only performed on the change of land use which caused by the construction of private residence or inheritance which still contained in Sidomulyo village.

Key Words : Community Resistance, Housing, Change of Land Use

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Tanah merupakan sumber penghidupan bagi manusia, sehingga harus dikelola dengan baik oleh Negara.Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa:

> "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan bahwa :

> "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan,persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Negara sebagai pengelola tanah, harus mengelola tanah dengan baik agar masyarakat menjadi lebih makmur mengingat tanah bersifat tetap. Tanah bersifat tetap, dalam arti tanah di bumi tidak akan bertambah,sedangkan jumlah penduduk di dunia akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan jaman. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan penduduk akan tanah seperti untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman juga terus bertambah

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan penduduk akan tanah yang bersifat tetap, maka pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukan dari penggunaan tanah dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan pertanahan,seperti Undang-Undang no 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H (1) Undang-Undang dasar (UUD) 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jadi bertempat tinggal merupakan hak dari setiap warga Negara.Rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan

penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup.

Pengertian perumahan dan permukiman sendiri menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

> "Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan"
> "Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni"

Untuk dapat meningkatkan kemakmuran maka pemerintah melaksanakan pembangunan di atas bidang tanah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, meningkat pula kebutuhan akan perumahan dan permukiman.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah maka perubahan penggunaan tanah tidak dapat dihindari. Sudarno (2001:21) mengemukakan bahwa:

> "Perubahan penggunaan tanah di suatu daerah,cenderung meningkat sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan fisik wilayah yang pesat"

Perkembangan suatu wilayah merupakn suatu hal yang harus terjadi dan tidak dapat dihindari karena perkembangan wilayah sejalan dengan pertambahan penduduk. Sutaryono (2003:15) mengungkapkan:

> ”Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk dan segala aktifitasnya untuk menopang hidup dan kehidupannya yang secara langsung maupun tidak langsung mempertinggi permintaan tanah”.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan tanah-tanah pertanian berubah penggunaannya. Perubahan penggunaan tanah menjadi perumahan dan permukiman dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tersedianya tempat tinggal bagi masyarakat, akan tetapi perubahan penggunaan tanah tersebut juga akan berdampak negatif pada menyusutnya tanah pertanian dan terancamnya ketahanan pangan suatu daerah.

Politik Hukum tentang ketahanan pangan diatur dalam Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-Undang ini memberikan pengertian” Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”

Kebutuhan pangan dalam hal ini beras terus mengalami peningkatan akibat pertambahan jumlah penduduk. Untuk mengimbangi peningkatan tersebut produksi beras nasional harus meningkat secara memadai dalam rangka mempertahankan kecukupan pangan. Kemampuan untuk menyediakan pangan harus diutamakan bersumber dari dalam negeri yang dihasilkan oleh petani-petani dalam negeri pula. Menurut Dewan Ketahanan pangan (2006)

dalam Syafa'at (2009:30) " Ketahanan pangan pada tingkat reformasi diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup,mutu yang layak,aman yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal".

Perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, kawasan industri atau sarana publik akan menimbulkan ancaman yang serius dalam masalah ketahanan pangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bagi petani penggarap dan buruh tani, perubahan penggunaan tanah dapat menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik. Dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi petani maka hal ini dapat menimbulkan kemiskinan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian. Sampai saat ini pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat akan tetapi implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai.

Di saat perubahan penggunaan tanah begitu cepatnya karena banyaknya investor yang membangun kompleks perumahan, elit lokal Desa Sidomulyo mengambil langkah untuk menolak pembangunan kompleks perumahan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warganya dari ancaman ketahanan pangan dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan elit lokal ini juga mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sidomulyo.

Fenomena perubahan penggunaan tanah saat ini sudah menjadi perhatian dan kekhawatiran dari para pengambil kebijakan masalah pangan, hal ini terutama yang terjadi di Pulau jawa. (Rahmanto, dkk. 2006 dalam Harini, 2012). Kekhawatiran terhadap ancaman ketahanan pangan dan dampak sosial ekonomi masyarakat ini juga dirasakan masyarakat, hal inilah yang membuat masyarakat bersikap resisten terhadap perubahan penggunaan tanah.

Resistensi merupakan penolakan untuk menerima, atau kurangnya antusiasme (keengganan) untuk menerima perubahan di desa-desa. (www.thefreedictionary.com). Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang resistensi masyarakat terhadap perubahan penggunaan tanah. Peneliti mengambil judul " RESISTENSI ELIT LOKAL DAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH" (STUDI DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN GODEAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Apa kebijakan elit lokal lokal Desa Sidomulyo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan melindungi warganya dari dampak sosial ekonomi perubahan penggunaan tanah?
2. Bagaimana resistensi masyarakat Desa Sidomulyo,Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman terhadap perubahan penggunaan tanah?

C. BATASAN MASALAH

Mengingat keterbatasan dan kemampuan calon peneliti serta demi optimalnya penelitian ini, maka penelitian terbatas pada bentuk resistensi masyarakat Desa Sidomulyo terhadap perubahan penggunaan tanah yang disebabkan oleh pembangunan perumahan oleh investor yang dapat mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan dan menyusutnya tanah pertanian dan untuk memahami dinamika elit local dalam mempertahankan tata guna tanah untuk kepentingan pangan.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

I. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kebijakan elit lokal lokal Desa Sidomulyo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan melindungi warganya dari dampak sosial ekonomi perubahan penggunaan tanah

b. Untuk mengetahui resistensi masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman terhadap perubahan penggunaan tanah.

II. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini peneliti berharap kelak dapat memperoleh tambahan wawasan, setidaknya mampu mengetahui resistensi masyarakat terhadap perubahan penggunaan tanah.

b. Sebagai bahan informasi dan wawasan dalam lingkup studi pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, khususnya menyangkut resistensi masyarakat dalam perubahan penggunaan tanah.

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam hal pengambilan kebijakan yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perubahan penggunaan tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satu yang menyebabkan berkurangnya tanah pertanian secara cepat adalah pembangunan perumahan oleh para investor. Elit lokal Sidomulyo berpendapat dengan menyusutnya tanah-tanah pertanian yang disebabkan oleh pembangunan perumahan akan dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Elit lokal Desa Sidomulyo mengambil kebijakan untuk melindungi tanah-tanah pertanian, yaitu dengan cara menolak pembangunan kompleks perumahan, Kebijakan tersebut telah mendukung Gapoktan Desa Sidomulyo untuk memperoleh penghargaan adhikarya pangan nusantara untuk kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan.
2. Penelitian ini menunjukkan sikap dari masyarakat Desa Sidomulyo terhadap perubahan penggunaan tanah terutama yang disebabkan oleh pembangunan perumahan merupakan perasaan tidak mendukung *(unfavourable)* atau bahkan bisa dikatakan resisten. Sikap masyarakat yang resisten terhadap perubahan penggunaan tanah dilakukan dengan cara mempertahankan tanah pertanian yang mereka miliki atau tidak menjual maupun mengalihkan tanah pertanian yang mereka miliki kepada para investor. Sikap resisten dari Elit lokal maupun masyarakat Desa Sidomulyo

hanya dilakukan pada perubahan penggunaan tanah yang disebabkan oleh pembangunan kompleks perumahan yang dilakukan oleh para investor saja, sedangkan perubahan penggunaan tanah yang disebabkan oleh pembangunan rumah pribadi atau pewarisan masih banyak terjadi di Desa Sidomulyo.

B. SARAN

1. Perubahan penggunaan tanah yang cukup tinggi di Kabupaten Sleman menunjukkan pemerintah belum serius dalam menangani masalah perubahan penggunaan tanah. Perangkat hukum belum jelas mengatur tentang sanksi-sanksi maupun kewenangan dari instansi yang menanganinya. Pengendalian perubahan penggunaan tanah perlu dilakukan karena penyediaan bahan pangan sangat dipengaruhi oleh adanya luas lahan pertanian yang ada. Perlu adanya perangkat hukum yang mengatur secara jelas dan terperinci yang mengatur tentang perubahan penggunaan tanah termasuk sanksi dan kewenangan instansi-instansi yang menanganinya.
2. Pemerintah harus mulai melindungi tanah-tanah pertanian produktif di Pulau Jawa karena tanah-tanah yang telah di konversi menjadi tanah non pertanian akan sulit untuk dikembalikan lagi menjadi tanah pertanian. Pemerintah harus mulai membuat solusi agar tanah-tanah pertanian di Pulau Jawa tetap terjaga, seperti memperkuat swasembada pangan dengan memberdayakan sektor pertanian lokal, selain itu pembangunan secara

vertikal dan melakukan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa perlu dilakukan.

3. Resistensi terhadap perubahan tanah yang di tunjukkan oleh masyarakat Sidomulyo merupakan sebuah wujud kearifan lokal yang seharusnya perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman karena Kecamatan Godean merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Sleman dan telah ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan.
4. Perlindungan tanah-tanah pertanian di Desa Sidomulyo tidak cukup hanya dengan resistensi masyarakat saja, akan tetapi kebijakan untuk melakukan penolakan perumahan sebaiknya diperdeskan agar mempunyai kekuatan hukum dan tidak hilang ketika terjadi pergantian aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alhalik. (2006). "Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman". http://eprints.undip.ac.id/15312/1/Alhalik.pdf. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013,pukul 16.26 WIB

Azwar, Saifuddin. (2004). "Metode Penelitian edisi pertama, cetakan kelima". Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

George, Susan.(2007). "Pangan dari Penindasan sampai ke Ketahanan Pangan". Yogyakarta: INSISTPress.

Harini, Rika. (2012). "Kajian Spasial Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Terkonversi Dan Dampaknya Terhadap Produksi Pangan di Kabupaten Sleman". Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Irawan, Bambang. (2008). " Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Konversi Lahan (Improving the Effectivity of land Corversion Policy". Forum Penelitian Agro ekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Karini, Dyah May. (2013) "Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan terhadap Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Kurniawan, Hamzah. "Persistensi Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pertambangan Emas Di Desa Bonto Katute Kabupaten Sinjai". http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8245/Untitledfg%20(0).pdf?sequence=1 .Diakses pada tanggal 18 Desember 2013,pukul 16.26 WIB

Moleong J. Lexy. (2008). "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Munir, Misbahul. "Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani". http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20132/4/Chapter%20I.pdf. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013, pukul.19.02 WIB

Nasoetion, L. I. 2003. "Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya. Dalam Kurnia et al (eds). Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah dan Lahan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat". Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Nugroho, Aristiono. (2001). "Resistensi Masyarakat Terhadap Modernisasi Penguasaan Hak Atas Tanah (Studi Di Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah)".Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

_____. (2012). "Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif". Tanpa Penerbit, Yogyakarta.

Puspitosari, Hesti. (2009), "Politik Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Yang Berbasis Kearifan Lokal". Jurnal Transisi.hal.1-9.

Saeni,Rahman. "Industri Pabrik Dan Masyarakat Lokal Di Pinggiran Kota Makassar".http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2120/RAHMAN%20SAENI_09A06003.pdf?sequence=1.Diakses pada tanggak 29 Desember 2013, pukul 22.30 WIB

Saleh, K. Wantjik .(1985). "Hak Anda Atas Tanah". Jakarta : Ghalia Indonesia.

Saud, Herman. (2010). "Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus Tentang Pembangunan dan Resistensi Masyarakat Nafri, Enggros, Tobati, dan Muara Tami Terhadap Pembangunan Obyek Wisata Pantai Holtekam di Kota Jayapura)". Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Setyohatmoko, deviet afrianto. (2012). "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konversi lahan sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2010". Tesis. . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sudarno. (2001). "Perubahan Fungsi Lahan dan Dampak pada Pendapatan Petani".Jurnal STPN volume 1.hal.16-24.

Sugiyono. (2008). "Memahami Penlitian Kualitatif". Alfabeta, Bandung.

Supriyadi,Anton. "Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi lahan pertanian".http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/16637/A04asu2.pdf?sequence=1. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013,pukul 16.35 WIB

Sutaryono.(2003). “Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengedalian Perubahan Penggunaan Tanah”. Jurnal Widya Bhumi.hal.13-20.

Syafa’at,Rahmat.(2009). “Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Sistem Kearifan Lokal Di Era Reformasi Menuju Millenium Development Goals”. Jurnal Transisi.hal.29-78.

Rustanto, Yohanes. (2013). “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian (2005-2009) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ritzer George & Goodman J.Douglas. (2008). “Teori Sosiologi Modern “edisi keenam”. Kencana, Jakarta.

Widaningsih, Purwati. (2008). “ Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan (Studi Kasus Di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Yunus, Hadi Sabari. (2001). “Perubahan Pemanfaatan lahan di daerah pinggiran Kota: Kasus di pinggiran kota Yogyakarta”. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indonesia. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

Website :

www.thefreedictionary.com

www.merriam-webster.com

www.dppd.slemankab.go.id

(www.bkpp.jogjaprov.go.id).